

Implementasi Program Pemantauan Pertumbuhan Balita oleh Dinas Kesehatan dalam Penurunan Stunting di UPT Puskesmas Tarogong, Kabupaten Garut

Implementation of the Toddler Growth Monitoring Program by the Health Office in Reducing Stunting at the Tarogong Public Health Center, Garut Regency

Silva Rizkia Syahmareta¹, Muhammad Taftazani Syahir M², Dini Nadila³

Jurusan Administrasi Publik, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia^{1,2,3}

Silvarzk5@gmail.com¹, Taftazanysyahir@gmail.com², dininadila@unpas.ac.id³

Disubmit : 21 November 2025, Diterima: 15 Desember 2025, Terbit: 30 Desember 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pemantauan pertumbuhan balita oleh Dinas Kesehatan dalam upaya penurunan angka stunting di UPT Puskesmas Tarogong Kabupaten Garut tahun 2025. Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Program pemantauan pertumbuhan balita menjadi strategi penting melalui kegiatan posyandu, penyuluhan gizi, dan intervensi terhadap balita dengan masalah pertumbuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin (1986) yang menekankan tiga indikator utama: kepatuhan, kelancaran rutinitas, serta kinerja dan dampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program berjalan cukup efektif, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Secara umum, program pemantauan pertumbuhan balita berperan positif dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Garut.

Kata Kunci: Balita, Implementasi kebijakan, Pemantauan Pertumbuhan, Stunting

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the toddler growth monitoring program by the Health Office in an effort to reduce stunting rates at the Tarogong Community Health Center in Garut Regency in 2025. Stunting is a public health problem that has a long-term impact on the quality of human resources. The toddler growth monitoring program is an important strategy through posyandu activities, nutrition counseling, and interventions for toddlers with growth problems. The research method used was descriptive qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation studies. Data analysis used Ripley and Franklin's (1986) policy implementation theory, which emphasizes three main indicators: compliance, routine smoothness, and performance and impact. The results of the study show that the program implementation was quite effective, but there were still obstacles such as limited human resources, suboptimal cross-sector coordination, and uneven community participation. In general, the toddler growth monitoring program played a positive role in accelerating the reduction of stunting in Garut District.

Keyword: Growth monitoring, Policy Implementation, Stunting, Toddlers

1. Pendahuluan

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang paling krusial di Indonesia. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif anak dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerintah Indonesia menjadikan penurunan prevalensi stunting sebagai prioritas nasional yang sejalan dengan pencapaian *Sustainable*

Development Goals (SDGs) point ketiga, yaitu menjamin kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua usia.

Di tingkat daerah, Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi, di mana dalam analisis spasial menunjukkan bahwa Kabupaten Garut termasuk kluster “*High-High*”, yaitu wilayah dengan prevalensi stunting tinggi yang berdekatan dengan wilayah tinggi lainnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Garut menjadi salah satu dengan prioritas penanganan dan intervensi stunting di Tingkat provinsi. Meskipun dikenal sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam dan ekonomi yang besar, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam akses layanan kesehatan dan gizi masyarakat.

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Garut (2022), mengungkapkan bahwa angka stunting masih tinggi, terutama di wilayah UPT Puskesmas Tarogong. Di Kecamatan Tarogong Kaler saja, tercatat 963 kasus stunting pada balita usia 6-23 bulan. Analisis faktor penyebab utama stunting di wilayah tersebut mencakup riwayat kehamilan, sanitasi lingkungan, pola asuh, pendapatan keluarga, dan layanan kesehatan. Selain itu, penelitian di beberapa desa Garut memperkuat temuan bahwa rendahnya Pendidikan orang tua, keterbatasan akses air bersih, dan rendahnya kesadaran gizi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kejadian stunting.

Sebagai respons terhadap tingginya prevalensi stunting, Pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 138 Tahun 2021 tentang Peran dan Kewenangan Desa dan Kelurahan dalam penurunan Stunting, serta Surat Edaran Bupati Nomor 623 Tahun 2024 tentang Gerakan Bersama Percepatan Penurunan Stunting Menuju Zero New Stunting. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, optimalisasi peran posyandu, serta pemberdayaan masyarakat sebagai strategi utama dalam penanganan stunting. UPT Puskesmas Tarogong berperan sebagai garda terdepan dalam implementasi kebijakan melalui program pemantauan pertumbuhan balita yang mencakup kegiatan posyandu, penyuluhan gizi, dan intervensi terhadap balita dengan masalah pertumbuhan. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan penurunan stunting sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah, khususnya dalam aspek kepatuhan pelaksana, koordinasi lintas sektor, dan dukungan kelembagaan (Kurniasih et al., 2022).

Namun demikian, implementasi program di lapangan tidak terlepas dari tantangan. Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya koordinasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pelaksanaan program belum sepenuhnya maksimal, meskipun arah kebijakan sudah jelas dan memiliki landasan hukum yang kuat.

Dalam konteks kebijakan publik, teori Implementasi Ripley dan Franklin (1986) menjadi landasan konseptual yang relevan untuk mengukur efektivitas program. Teori ini menyoroti tiga indikator penting keberhasilan implementasi: kepatuhan terhadap aturan, kelancaran pelaksanaan, dan pencapaian hasil. Ketiga aspek tersebut menjadi kunci dalam menilai sejauh mana program pemantauan pertumbuhan balita di UPT Puskesmas Tarogong telah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting di daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk dilakukan. Hasil kajian diharapkan tidak hanya memberikan Gambaran empiris mengenai efektivitas implementasi kebijakan, tetapi juga menjadi masukan strategis bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

2. Metode Penelitian

Kegiatan ini menggambarkan secara mendalam proses implementasi program pemantauan pertumbuhan balita oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut melalui UPT

Puskesmas Tarogong dalam upaya penurunan stunting. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Puskesmas, Petugas Gizi, dan masyarakat. Data sekunder bersumber dari laporan posyandu, serta data stunting Kabupaten Garut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1984) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

3. Hasil dan Pembahasan

Proses implementasi program pemantauan pertumbuhan balita di UPT Puskesmas Tarogong Kabupaten Garut

Tingkat Kepatuhan

Tingkat kepatuhan implementor merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana pelaksana mematuhi prosedur, pedoman, dan standar operasional yang telah ditetapkan. Dalam program pemantauan pertumbuhan balita di UPT Puskesmas Tarogong, kepatuhan dapat diamati melalui disiplin pelaksanaan posyandu, ketelitian pengukuran, konsistensi pencatatan data, serta tindak lanjut berupa edukasi dan intervensi gizi.

Pelaksanaan kegiatan rutin diawali dengan kehadiran petugas sesuai jadwal dan pengecekan alat ukur sebelum digunakan. Praktik ini memastikan validitas dan reliabilitas data pertumbuhan balita, yang menjadi dasar penting bagi intervensi gizi yang efektif dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Kader posyandu juga memegang peranan penting, khususnya dalam pencatatan hasil pengukuran dan pelaporan kegiatan.

Proses pelaporan dilakukan secara sistematis. Data hasil penimbangan dan pengukuran dicatat oleh kader, dilaporkan kepada petugas kesehatan, dan kemudian dimasukkan ke sistem digital. Pemanfaatan sistem berbasis aplikasi memungkinkan akses data secara real-time oleh Dinas Kesehatan, meningkatkan efisiensi monitoring program. Penguatan kapasitas kader menjadi kunci untuk menjaga kualitas data.

Regulasi berupa Peraturan Bupati, Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting, serta SOP kegiatan gizi masyarakat memberikan kerangka prosedural yang jelas dan menjadi panduan teknis bagi implementor. Pengawasan dan monitoring berkelanjutan diperlukan untuk memastikan kepatuhan implementor bersifat faktual, bukan hanya formal.

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan implementor tergolong baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan prosedur sesuai standar, penggunaan sistem pelaporan digital, serta dasar regulasi yang memadai. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kapasitas kader tetap menjadi aspek strategis untuk mencapai target penurunan stunting secara optimal.

Kelancaran Rutinitas Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas Tarogong menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup keterbatasan jumlah tenaga gizi, perbedaan kemampuan kader, serta keterbatasan waktu dalam pelayanan. Faktor eksternal meliputi partisipasi masyarakat yang belum optimal, kondisi sosial-ekonomi, dan dinamika koordinasi lintas sektor.

Meskipun begitu, kegiatan rutin posyandu secara umum berjalan sesuai alur, mulai dari pendaftaran, pengukuran, pencatatan, hingga penyuluhan. Rendahnya kehadiran balita menandakan perlunya strategi tambahan untuk menjangkau anak yang tidak hadir. Ketimpangan kapasitas kader menekankan perlunya pelatihan dan standarisasi prosedur, sehingga kualitas pelayanan merata di seluruh posyandu.

Faktor waktu dan penyesuaian jadwal menjadi kendala lain. Upaya menjaga kelancaran program dilakukan melalui pengawasan langsung petugas gizi terhadap kader, termasuk koreksi dan bimbingan pada proses pengukuran dan pencatatan.

Koordinasi lintas sektor melalui pertemuan rutin dan pemanfaatan teknologi komunikasi seperti Zoom atau grup WhatsApp mempermudah respons terhadap kendala teknis di lapangan. Efektivitas koordinasi bergantung pada komitmen seluruh pihak, termasuk kader, tenaga kesehatan, dan pemangku kebijakan.

Dengan pengawasan dan koordinasi yang terus dilakukan, meskipun terdapat kendala sumber daya dan jadwal, rutinitas program tetap berjalan. Peningkatan kapasitas kader dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat menjadi prioritas kebijakan untuk memperkuat keberlanjutan program.

Kinerja dan Dampak

Kinerja implementasi program dapat diukur dari sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai prosedur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program ini secara umum berjalan baik, meskipun partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Strategi kunjungan rumah dilakukan untuk menjangkau balita yang tidak hadir di posyandu, sehingga semua anak tetap terpantau.

Program ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan balita dan pola gizi yang tepat. Posyandu menjadi sarana edukasi, memudahkan orang tua mengakses informasi kesehatan, dan memperkuat hubungan antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Program memberikan manfaat langsung, termasuk pemantauan pertumbuhan anak dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Kepatuhan implementor tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup inisiatif moral untuk mengatasi kendala teknis dan sosial. Petugas gizi melakukan edukasi, intervensi gizi, dan tindak lanjut yang bersifat preventif maupun kuratif. Program ini berorientasi pada hasil, bukan sekadar prosedur formal.

Dari sisi pemerintah daerah, data hasil pemantauan diintegrasikan ke dalam aplikasi SIGIZI Terpadu untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Data yang akurat memungkinkan perencanaan intervensi jangka pendek dan kebijakan strategis jangka panjang. Program ini berfungsi ganda: sebagai layanan rutin masyarakat dan sebagai instrumen strategis perumusan kebijakan kesehatan.

Evaluasi menunjukkan penurunan prevalensi stunting dari 24,1% menjadi 14,2%, (Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, 2024) yang menjadi indikator keberhasilan program. Meskipun demikian, keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor, dukungan kebijakan nasional, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Dampak Program Pemantauan Pertumbuhan Balita terhadap Penurunan Stunting

Program pemantauan pertumbuhan balita di UPT Puskesmas Tarogong memberikan dampak signifikan dalam upaya penurunan stunting. Kegiatan rutin posyandu, termasuk penimbangan, pengukuran, pencatatan, dan edukasi gizi, memungkinkan pemantauan pertumbuhan anak secara berkala.

Salah satu dampak utama adalah fungsi deteksi dini terhadap anak berisiko stunting atau masalah gizi. Pemantauan rutin memungkinkan tindakan preventif dan kuratif segera, termasuk konseling gizi dan rujukan medis. Program ini meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pertumbuhan balita, sehingga terjadi perubahan perilaku yang mendukung keberhasilan jangka panjang.

Dari perspektif pemerintah daerah, data pemantauan yang dihimpun melalui SIGIZI Terpadu menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti. Data ini memungkinkan

identifikasi prevalensi stunting, wasting, dan obesitas, serta mendukung perumusan intervensi yang tepat.

Evaluasi program menunjukkan penurunan prevalensi stunting dari 24,1% menjadi 14,2%. Penurunan ini merupakan bukti konkret efektivitas program, meskipun keberhasilan juga dipengaruhi oleh dukungan lintas sektor, kebijakan nasional, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Program ini memberikan manfaat langsung bagi keluarga dan dampak strategis bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan kesehatan.

4. Penutup

Implementasi program pemantauan pertumbuhan balita di UPT Puskesmas Tarogong dapat disimpulkan berjalan cukup efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Garut. Kepatuhan implementor terhadap prosedur, standar operasional, dan regulasi yang berlaku, serta pelaksanaan posyandu secara rutin, menunjukkan komitmen yang kuat dan orientasi pada hasil (outcome-oriented). Program ini tidak hanya berfungsi sebagai layanan pemantauan pertumbuhan balita dan edukasi gizi bagi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam tata kelola kesehatan daerah melalui penyediaan data yang akurat dan terintegrasi dalam SIGIZI Terpadu. Meskipun masih dihadapkan pada kendala keterbatasan tenaga gizi, variasi kapasitas kader, penyesuaian jadwal, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal, keberhasilan program tercermin dari penurunan prevalensi stunting dari 24,1% menjadi 14,2%. Hal ini menegaskan bahwa pemantauan pertumbuhan balita berperan signifikan dalam mendukung percepatan penurunan stunting, seiring dengan dukungan koordinasi lintas sektor, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar peningkatan kapasitas kader posyandu terus dilakukan melalui pelatihan rutin guna menyeragamkan dan meningkatkan akurasi pengukuran serta pencatatan pertumbuhan balita. Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan serta penambahan tenaga gizi perlu menjadi perhatian untuk mengatasi beban kerja dan luasnya cakupan pelayanan. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan posyandu juga harus terus didorong agar pemantauan pertumbuhan dan intervensi dini dapat dilakukan secara optimal. Di sisi lain, pemanfaatan aplikasi SIGIZI Terpadu perlu terus ditingkatkan dan dioptimalkan agar data yang dihasilkan semakin berkualitas dan mampu mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti dalam upaya penurunan stunting secara berkelanjutan.

Referensi

- Atmadji, E., & Nugraha, B. P. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting di Desa Salamnunggal Kecamatan Leles Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). *The public management and administration: An introduction*. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Devi, Y. P., Indawati, R., Febrianto, E. C., & Nuraidah, L. F. (2024). Analisis autokorelasi spasial prevalensi stunting di Provinsi Jawa Barat tahun 2021.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2017). *Buku pedoman pencegahan stunting di desa*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Pedoman penilaian status gizi anak*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

- Nurdiansyah, I. L., Ramdhani, A., Rismayanti, E., & Adnan, Z. (2024). Analisis faktor yang mempengaruhi stunting anak usia 6–23 bulan di Tarogong Kaler. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 15(1), 30–39.
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2021). *Peraturan Bupati Garut Nomor 138 Tahun 2021 tentang Peran dan Kewenangan Desa dan Kelurahan dalam Penurunan Stunting*.
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2024). *Surat Edaran Bupati Garut Nomor 623 Tahun 2024 tentang Gerakan Bersama Percepatan Penurunan Stunting Menuju Zero New Stunting*.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy implementation and bureaucracy*. Chicago, IL: Dorsey Press.